

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini diuraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dan tepat dari hasil penelitian dan pembahasan, sedangkan saran merupakan rekomendasi atau masukan terhadap kesimpulan yang tidak maksimal.

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

Proses pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Dan Penanggung Jawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal, hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan untuk proses Pelaporan Realisasi Penggunaan ADD belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan dana untuk tahapan berikutnya. Begitu pula dengan pertanggung jawaban penggunaan ADD sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja pemerintah desa dan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu.

Faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi faktor pendukung dan penghambat, faktor pendukung yakni adanya partisipasi masyarakat dalam hal mengibahkan tanahnya kepada Pemerintah Desa, sarana dan prasarana yang memadai, sedangkan faktor penghambat yakni keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia Aparat Pemerintah Desa Di Desa Plampang yang rata-rata berpendidikan SMK/SMK. Hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan ADD dan petunjuk teknis pengelolaan ADD yang setiap tahun berubah, fenomena ini menyebabkan tim pelaksana kegiatan ADD mempunyai kesulitan dalam melaksanakan tugasnya da komunikasi masyarakat yang kurang mampu mengutarakan pendapat di depan umum.

5.2 Saran

Proses pengelolaan ADD yang dilakukan oleh aparat Desa Plampang harus mengikuti prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis pengelolaan ADD. Beberapa upaya yang perlu dilakukan yakni dalam proses penggunaan anggaran sebaiknya Pemerintah Desa melakukan survey terlebih dahulu sehingga pembangunan yang pemerintah laksanakan tepat sasaran. Selain itu, pembinaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan kepada aparat Desa perlu ditingkatkan. Aparat Desa Plampang, masyarakat dan seluruh pihak yang terkait disarankan dapat bekerja sama dalam pengelolaan ADD di Desa Plampang dengan meminimalisir faktor penghambat dan meningkatkan faktor pendukung dalam pengelolaan ADD.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, Mualiyanna (2017) *Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 di Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.*

Amin Widjaja Tunggal, 1993, *Manajemen Suatu Pengantar, PT Rineka Cipta, Jakarta*

Anita dan Nurzianti, Rahma. 2014. *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Di Kabupaten Aceh Besar. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis Vol. 1, No. 1, Maret 2014 Hal. 58-71*

Anthony, R., Vijay Govindrajan, (2005), *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisi 11 Buku 1, Salemba Empat, Jakarta.

Beni Pekei. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Buku 1.Jakarta Pusat : Taushia ejournal.unsrat.ac.id > index.php > article >*

Hansen, Mowen 2004. *Manajemen Biaya, Edisi Bahasa Indonesia*. Buku Kedua. Jakarta: Salemba Empat

Hanif, Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Penerbit ERLANGGA

<http://repository.ummat.ac.id/846/1/COVER-BAB III%5B1%5D.pdf>

<http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/23412>

<https://elib.unikom.ac.id/download.php?id=347669>

<https://www.neliti.com/publications/126955/efektivitas-penggunaan-anggaran-pendapatan-belanja-desa-apbdes-tahun-2015-di-desa>

<http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/5443>

<http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/20954>

<http://eprints.polsri.ac.id/3341/3/BAB%20II.PDF>

Husaini, Usman.2009. *Metodologi Penelitian Sosial*.Jakarta : Bumi Aksara.

Mahmudi, 2010, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Mardiasmo. (2017). *Tinjauan atas Pelaksanaan Penghitungan, Pemotongan,, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh AS Rahmawati .*

Mardiasmo.2009,*Perpajakan Indonesia(edisi revisi)*,Yogyakarta.Andi CV

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Mahmudi.2016. *Akuntansi Sektor Publik*.Yogyakarta: UII Press

Mardiasmo.2002. *Akuntansi Sektor Publik*.Yogyakart: ANDI

Moleong, L. (2006). *Metodologi Penelitian Kuatitativ*. Jakarta : Remaja

Rosdakarva.

Munandar, M. 2000. *Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*. Cetakan Ketigabelas. Yogyakarta: BPFE.

Maria Eni Surasih, *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*, (Jakarta: Erlangga), 2006

Nugraha, Aria (2019) *Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Pada Desa Trantang Sakti Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur Tahun 2016 2018.*

Octaviani, Seni Wulan (2018) *Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Pembangunan di Desa Cangkuang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.*

PERMENDAGRI (peraturan pemerintah dalam negeri) No.20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2014).

Permendagri No.37 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Anggaran

Simamora, Henry, 1999, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi ke-2, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Afabeta

Sri Wulandari S, *Analisis Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin,*

Sujarweni.2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*.Yogyakarta : Pustaka Baru Press

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Widjaja. 2003. *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.





* Upaya dan tanggapan pemerintah desa terkait birokrasi dan manajemen keuangan desa

*Pengisian ini dibutuhkan pengamatan dan pendalaman dari tim peneliti, untuk menguji kebenaran, dapat menggunakan metode wawancara dan penelusuran dokumen/bukti terkait.

| Upaya | Checklist | |
|---|------------------|--------------|
| | Ya | Tidak |
| Pembentukan Hukum (Perdes) tentang RPJMDesa | | |
| Pembentukan Hukum (Perdes) tentang RKP- Desa | | |
| Pembentukan Hukum (Perdes) tentang APBDesa | | |
| Program Pelatihan dan upgrading pembuatan dan penyusunan laporan keuangan desa | | |
| Pembentukan program pelatihan staf desa | | |
| Koordinasi dengan Pemda terkait pengelolaan keuangan desa | | |
| Mengajukan bantuan/kerjasama kepada lembaga bantuan pengembangan literasi dan Pengoperasian ITE | | |
| Pemasangan baliho/banner/stiker/selebaran terkait dengan infomasi laporan penggunaan dana desa | | |
| Sosialisasi oleh OPD/lembaga pemerintah/lembaga lain tentang penguatan pemahaman birokrasi penjemputan program dan Proposal | | |
| Lainnya | | |
| | | |

1. Potensi dan kapasitas stakeholders desa dalam pengelolaan Keuangan Desa

*Pengisian ini dibutuhkan pengamatan dan pendalaman dari peneliti, untuk menguji kebenaran, disarankan untuk meminta dokumen profil desa, RPJMDES, dokumen lain untuk meguraikan kondisi.

| Potensi/Kapasitas | Uraian Kondisi |
|---|---|
| Jumlah penduduk | |
| Pekerjaan Penduduk (3 pekerjaan teratas) | |
| Pendidikan Penduduk (3 pekerjaan teratas) | |
| Tanggapan atau presepsi masyarakat tentang efektifitas pengelolaan keuangan desa (Menurut tokoh masyarakat/tokoh adat) | |
| Pendapat perangkat desa terhadap perkawinan usia anak | |
| Pengetahuan/pemahaman perangkat desa terhadap penguasaan pengeoprasian IT (computer dan Sistem Keuangan Desa) | Tingkat kemampuan : a. Sangat Baik b. Baik c. Cukupd. Kurang |
| Periode sosialisasi sebagai Staf/sekdes/Bendahara | Tingkatan: a. >10 b. 5-10 c. 1-5 d. Tidak pernah |
| Fungsi BPD (Menginisiasi pengawasan pengelolaan keuangan Desa) | |
| Pendidikan/Sekolah (Jumlah dan kondisi) Staf desa | |
| Keterdediaan sarana dan fasilitas pendukung (menunjang tata kerja manajemen kuangan desa) | |
| Eksistensi Karang Taruna/organisasi kepemudaan/organisasi keagamaan dalam keterlibatan penggalian gagasan program RPJMDesa dan RAPBDesa pada musdus dan musrenbang desa | |
| Lainnya | |
| | |

2. Pengukuran Persepsi (Skala Likert) – UNTUK MASYARAKAT UMUM

- Sampling minimal 5 orang di Desa tersebut
- Sampling tersebar sesuai karakter penduduk/variasi pekerjaan, kedudukan, pendidikan dan kelas sosial

| Pernyataan | Sangat tidak setuju | Tidak Setuju | Kurang Setuju | Setuju | Sangat Setuju |
|--|---------------------|--------------|---------------|--------|---------------|
| Tingkat kepuasaan masyarakat terhadap keterbukaan informasi keuangan desa | | | | | |
| Adakah keterlibatan masyarakat dalam menggali gagasan sebagai dasar acuan musdus dan musrenbang desa | | | | | |
| Adakah Keterbukaan informasi terhadap PAD, ADD, DD dan lainnya | | | | | |
| Pernahkah selama ini pertanggungjawapan keuangan melibatkan masyarakat | | | | | |
| Efektifkah tentang pengelolaan keuangan desa | | | | | |
| Adakah sosialisasi keterlibatan masyarakat terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Desa. | | | | | |
| Adakah pungutan kepada rakyat yang berkaitan dengan keuangan Desa. | | | | | |
| Pernahkah terjadi pemotongan atau dalam bentuk lain kepada masyarakat seperti Bantuan Sosial, dan lain sebagainya. | | | | | |
| Tetap sasaranlah pengelolaan keuangan desa. | | | | | |

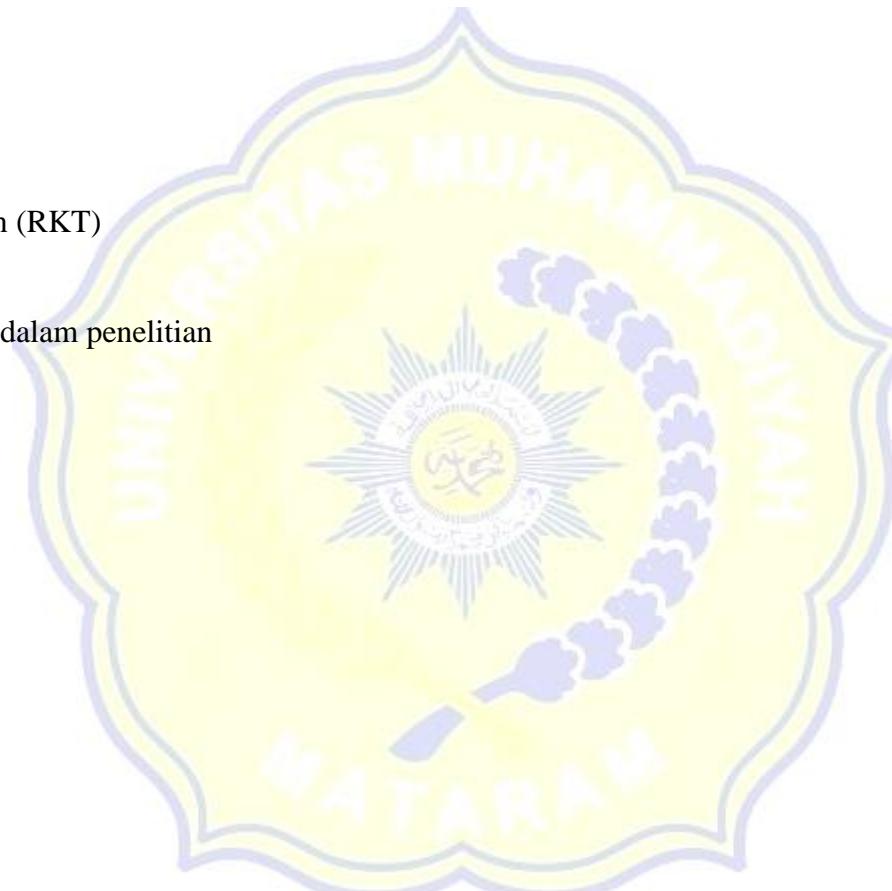
3. Pengukuran Persepsi (Skala Likert) – UNTUK STAF/ PEMDES

- Sampling Untuk Responden (Kaur Desa/Sekdes/Bendahara)
- Sampling tersebar sesuai karakter dan Tugas, fungsi serta tanggungjawab kerja

| Pernyataan | Sangat tidak setuju | Tidak Setuju | Kurang Setuju | Setuju | Sangat Setuju |
|--|---------------------------|-----------------|------------------|--------|------------------|
| Saya bias menguasai IT Program (word dan Excel) dalam pengelolaan keuangan Desa | | | | | |
| Saya bekerja sesuai bidang yang di SK kan | | | | | |
| Saya tidak pernah melakukan pelatihan pembuatan laporan keuangan desa | | | | | |
| Saya masih belum begitu menguasai pelaporan melalui Aplikasi system kuangan desa | | | | | |
| Saya membuat list laporan keuangan perbulan, triwulan, semester, dan tahunan | | | | | |

***Kebutuhan Data Untuk Mendukung Pedoman Penelitian**

1. Profil Desa
2. RPJMDes
3. APBDesa
4. RKP-Desa
5. Rencana Kerja Tahunan (RKT)
6. Dokumen/dokumentasi
7. Hambatan dan kendala dalam penelitian



LAMPIRAN
DOKUMENTASI WAWANCARA



Dokumntasi Wawancara Dengan Kepala Desa Desa Plampang
Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa



Dokumentasi Wawancara Dengan Sekertaris Desa Desa
Plampang Kecamatan Plampang



Dokumentasi Degan Tokoh Masyarakat Desa Plampang



Dokumentasi Wawancara Dengan Ketua BPD Desa Plampang



Dokumentasi Wawancara Dengan Perangkat Desa Kasi
Pemerintahan



Dokumentasi Wawancara Dengan Perangkat Desa Kasi SOSMAS